



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan yang dapat menumbuhkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
 - b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. isu strategis yang berkembang;
 - d. kebijakan nasional; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran umum;
 - c. bab III : tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. bab IV : analisis kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. bab V : strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. bab VI : peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. bab VII : program indikatif; dan
 - h. bab VIII : penutup.
- (2) Uraian rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian atau Riset dan Inovasi salah satu instrumen penting untuk menyongsong kemajuan zaman. Oleh sebab itu iklim keduanya harus dikuatkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan dari skala nasional hingga Daerah. Perencanaan berbasis Riset dan Inovasi juga memungkinkan terciptanya kebijakan-kebijakan yang terukur dan jelas dalam konteks pembangunan.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk menguatkan dan mendorong ekosistem Riset dan Inovasi di sebuah Daerah dalam rangka mempercepat target yang perencanaan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Semarang tahun 2025-2045. Selain itu penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Penguatan ekosistem Riset dan Inovasi ini juga diharapkan mampu untuk mengoptimalkan tema prioritas di Kabupaten Semarang, misalnya yang terkait penguatan daya saing dan perekonomian Daerah, pemecahan permasalahan dan isu strategis Daerah, hingga peningkatan kualitas dalam pelayanan publik di Kabupaten Semarang. Percepatan dengan pencapaian target pembangunan dilakukan berdasarkan hasil telaah terhadap target dan program pembangunan yang semuanya ada di dalam RPJMD, berikut juga hasil evaluasi capaiannya.

Adapun dengan prioritas pembangunan yang dipilih di Kabupaten Semarang dibuat selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan arah Pembangunan Nasional. Prioritas ini dibuat menjadi linier agar tercapai hasil yang maksimal dan ada keterpaduan dokumen yang disusun. Di samping itu penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga harus selaras dengan kebijakan dalam lingkup wilayah kerja Kabupaten Semarang.

Dalam rencana jangka panjang yang sudah disusun sebelumnya, sudah ditetapkan beberapa permasalahan di Daerah yang memiliki urgensi untuk diselesaikan di Kabupaten Semarang. Beberapa permasalahan yang muncul misalnya yang berkaitan dengan persoalan pembangunan dimana aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing Daerah, dan pelayanan umum masih menjadi catatan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Di samping itu juga sudah dirumuskan beberapa isu strategis yang berpotensi menjadi peluang dan tantangan dalam Daerah, sehingga membutuhkan perhatian tersendiri untuk dipikirkan bersama dan mengolahnya menjadi keuntungan untuk Kabupaten Semarang. Isu strategis Kabupaten Semarang ini juga merupakan turunan dari isu strategis mulai dari tingkat internasional, nasional, hingga Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Semarang menyadari bahwa turunan dari isu-isu tersebut juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Kabupaten Semarang di masa yang akan datang. Sehingga dari penjelasan tersebut, muncul rumusan isu strategis di Kabupaten Semarang diantaranya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang belum optimal, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tata kelola pemerintah dan Inovasi Daerah persoalan lingkungan dan iklim, hingga yang terkait mitigasi bencana dan kondusifitas wilayah.

Di samping itu rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Semarang ini juga berupaya memberikan rumusan dengan Produk Unggulan Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Semarang. Sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang memiliki banyak sekali potensi baik dari sektor barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Semarang tidak hanya menjadikan Kabupaten Semarang baik dalam sektor jasa, terutama karena banyaknya industri di wilayah ini, namun juga mengembangkan produk-produk unggulan yang nantinya bisa di ekspor, dalam kaitan ini terutama sekali produk pertanian. Di samping penyempurnaan produk, *branding* dengan produk unggulan ini juga penting agar masyarakat dan pihak lainnya mengetahui potensi yang ada di Kabupaten Semarang ini.

Berdasarkan uraian ini terkait upaya untuk mempercepat kemajuan Daerah Kabupaten Semarang yang berorientasi pada Riset dan Inovasi, maka disusunlah sebuah rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Semarang tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Regulasi dan dasar hukum dengan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten Semarang Daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Menentukan arah kebijakan dan tahapan penguatan Riset dan Inovasi yang tertuang dalam peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2025-2029;
2. Memberikan usulan program dan kegiatan Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang selama periode 2025-2029;

Sasaran:

1. Tersusunnya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
2. Tersusunnya rencana aksi program dan kegiatan tahunan untuk percepatan pencapaian target RPJMD Tahun 2025 -2029;

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada 7° 4' 39,146" sampai dengan 7° 29' 49,488" Lintang Selatan dan antara 110° 14' 53,993" sampai dengan 110° 39' 41,371" Bujur Timur. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km², terdiri dari 19 Kecamatan yang mencakup sebanyak 208 desa dan 27 kelurahan.

Data iklim terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang menerima curah hujan rata-rata 1.590,8 mm dan 87 hari hujan rata-rata selama tahun 2023 (BPS, 2024). Kondisi inilah yang menjadikan suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang relatif sejuk (Nugraha, 2021). Dengan ketinggian rata-rata mencapai 318 meter hingga 1.450 meter di atas permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang berupa dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan, di antaranya:

- a. Pegunungan Sodong berlokasi di Kecamatan Tenganan.
- b. Pegunungan Rong berlokasi di Kecamatan Tuntang.
- c. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng berlokasi di Kecamatan Suruh.
- d. Pegunungan Pasokan, Kredo, dan Tengis berlokasi di Kecamatan Pabelan.
- e. Pegunungan Kalong berlokasi Kecamatan Ungaran.
- f. Pegunungan Sewakul berlokasi di Kecamatan Ungaran.
- g. Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tenganan.
- h. Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru dan Getasan.
- i. Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan Sumowono.

Dilihat dari luas wilayah, wilayah terluas terletak di Kecamatan Pringapus dengan luas 8.427 hektar, sedangkan untuk wilayah tersempit terletak di Kecamatan Ambarawa dengan luas 2.979 hektar, apabila dilihat dari rata-rata ketinggian wilayah, ketinggian tertinggi terletak di Kecamatan Getasan, Sumowono, dan Bandungan. Sebaliknya untuk kecamatan dengan rata-rata ketinggian terendah terletak di Kecamatan Bancak. Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 7 kabupaten atau kota, selain itu di tengah-tengah wilayah ini terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening (Wahyudi, 2021). Berikut batas wilayah dari Kabupaten Semarang:

- a. Sebelah Utara: Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Grobogan;
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung;
- e. Kota Salatiga terletak di dalam Kabupaten Semarang.

Sex ratio mengalami penurunan, pada tahun 2024 menjadi sebesar 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) dari 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) laki-laki per 100 (seratus) perempuan di Kabupaten Semarang.

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Ambarawa sebesar 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) jiwa/km², lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Semarang yang sebesar 1.069 (seribu enam puluh sembilan) jiwa/km². Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan pusat perekonomian baru sehingga sebaran penduduk bisa tersebar di kecamatan lain.

Tabel 2. 2 .Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (jiwa/km²)

Kecamatan	Luas Km²	2020	2021	2022	2023	2024
Getasan	68,03	778	781	786	792	797
Tengaran	49,95	1.441	1.449	1.459	1.474	1.486
Susukan	50,31	985	993	1.002	1.014	1.025
Kaliwungu	31,08	975	983	993	1.005	1.016
Suruh	66,21	1.059	1.069	1.082	1.098	1.111
Pabelan	51,86	857	867	879	893	905
Tuntang	61,18	1.123	1.131	1.140	1.153	1.164
Banyubiru	51,85	854	857	862	869	875
Jambu	52,06	781	784	789	796	802
Sumowono	58,86	577	581	587	594	599
Ambarawa	29,79	2.140	2.147	2.157	2.174	2.185
Bandungan	47,41	1.240	1.247	1.256	1.269	1.279
Bawen	46,99	1.270	1.276	1.284	1.296	1.304
Bringin	68,19	681	686	691	699	705
Bancak	45,51	525	531	539	548	556
Pringapus	84,27	675	680	686	693	700
Bergas	45,81	1.657	1.665	1.677	1.693	1.705
Ungaran Barat	48,79	1.662	1.667	1.675	1.688	1.697
Ungaran Timur	61,12	1.305	1.318	1.333	1.352	1.368
Kabupaten Semarang	1.019,27	1.033	1.040	1.048	1.060	1.069

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

2.1.3. Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2024, banyaknya penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 654.412 orang atau 96,27% dari jumlah angkatan kerja. Banyaknya penduduk angkatan kerja di Kabupaten Semarang secara keseluruhan pada tahun 2024 mencapai 679.734 orang, terdiri dari 369.109 penduduk laki-laki dan 310.625 penduduk Perempuan.

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 79,29% pada tahun 2024 dibanding sebelumnya 76,07% pada tahun 2023. Namun jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu. Hal ini juga ditunjukkan pada angka persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja juga menunjukkan peningkatan jika dibandingkan hasil Sakernas tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan indikasi tingkat pengangguran terbuka dikalangan angkatan kerja. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Semarang menunjukkan angka 3,73. Angka ini lebih tinggi 0,32 poin dibandingkan TPT tahun 2023 sebesar 4,05 (BPS, 2025).

Tabel 2. 3 Gambaran Umum Aspek Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja (Orang)	629.038	630.040	650.497	645.289	679.734
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	600.322	598.413	619.227	619.153	654.412
3	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	208.884	220.207	212.027	203.032	177.492
4	Jumlah Penduduk > 15 Tahun	818.688	827.599	836.899	846.597	857.226
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,07	74,10	75,42	76,07	79,29
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,57	5,02	4,81	4,05	3,73

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2024, banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 654.412 orang. Mata pencaharian penduduk bekerja Kabupaten Semarang tahun 2024 didominasi pada sektor di bidang jasa sebanyak 273.257 orang (41,8%), sektor industri sebanyak 246.668 orang (37,7%), dan dalam sektor pertanian sebanyak 134.487 orang (20,5%). Lihat tabel berikut:

Tabel 2. 4 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2024

NO	LAPANGAN USAHA	URAIAN		
		L	P	JUMLAH
1	Penduduk Belum / Tidak Bekerja	70.644	132.170	202.814
2	Penduduk Bekerja	353.158	301.254	654.412
	a.) Pertanian	87.152	47.335	134.487
	b.) Industri	123.385	123.283	246.668
	c.) Jasa	142.621	130.636	273.257
	Jumlah	353.158	301.254	654.412

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Semarang tahun 2024 sebesar Rp 65.584.850 juta. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 4.300.670 juta apabila dibandingkan tahun 2023 (BPS, 2025).

Perekonomian masyarakat di Kabupaten Semarang yang diukur melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha dalam sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 38,71%. Penyumbang terbesar kedua yakni dalam sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 14,26%. Kontributor terbesar ketiga terhadap struktur ekonomi Kabupaten Semarang ialah sektor perdagangan besar dan eceran sekaligus reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 10,62%.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 ditinjau berdasarkan 17 kategori lapangan usaha, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang, Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (%)				
	2020	2021	2022	2023*)	2024*)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,20	10,78	10,47	10,45	10,99
B. Pertambangan dan Penggalan	0,27	0,28	0,25	0,24	0,24
C. Industri Pengolahan	39,14	39,23	39,10	38,75	38,71
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	13,58	13,90	13,78	14,00	14,26

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,53	10,81	10,78	10,85	10,62
H. Transportasi dan Pergudangan	1,66	1,70	2,72	2,93	2,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,97	3,00	3,23	3,34	3,36
J. Informasi & Komunikasi	4,17	4,17	3,90	3,98	4,12
K. Jasa Keuangan & Asuransi	3,55	3,56	3,55	3,44	3,31
L. <i>Real Estate</i>	3,06	3,00	2,91	2,90	2,89
M.N Jasa Perusahaan	0,55	0,54	0,54	0,55	0,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	2,48	2,46	2,28	2,22
P. Jasa Pendidikan	4,39	4,34	4,05	3,99	4,10
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,85	0,82	0,78	0,78	0,79
R.S.T.U Jasa Lainnya	1,25	1,22	1,32	1,36	1,38

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

PDRB per kapita digunakan sebagai perkiraan rata-rata pendapatan penduduk per kapita per tahun, yang menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 cenderung meningkat, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 mengakibatkan PDRB per kapita mengalami kontraksi hingga -2,85% (minus dua koma delapan puluh lima persen). tahun 2021-2024 menunjukkan perkembangan positif yaitu 2,61% (dua koma enam puluh satu persen) pada tahun 2021 menjadi 3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen) tahun 2024.

Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Semarang ADHB tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,33% meningkat menjadi 6,16% pada tahun 2024. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

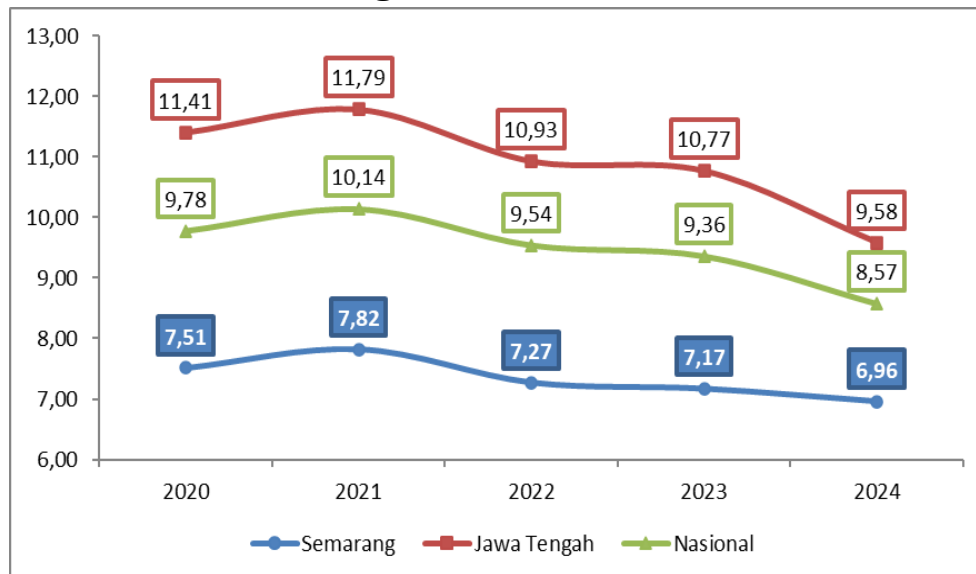
TAHUN	PDRB PER KAPITA ADHB		PDRB PER KAPITA ADHK 2010	
	NILAI (Rp. juta)	PERTUMBUH AN (%)	NILAI (Rp. juta)	PERTUMBUH AN (%)
2020	46,67	-1,33	33,00	-2,85
2021	48,79	4,54	33,86	2,61
2022	52,87	8,36	35,34	4,36
2023*)	56,71	7,26	36,69	3,83
2024**)	60,18	6,16	38,10	3,86

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang sebesar 6,96% (enam koma sembilan puluh enam) pada tahun 2024. Namun demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada rentang tahun 2020-2024 (per September) selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

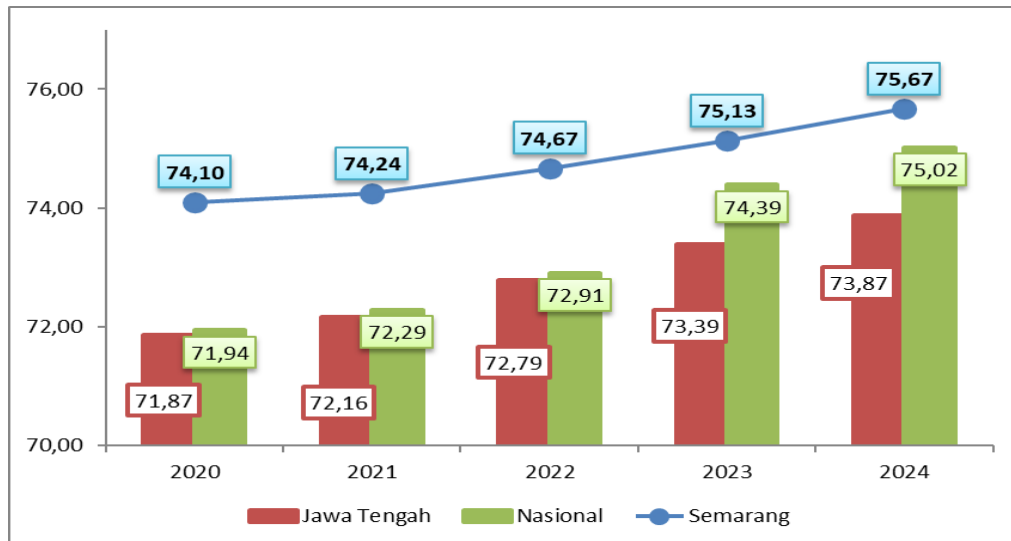
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang menunjukkan tren yang membaik, meskipun tantangan tetap ada. Peningkatan kesejahteraan ini juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2020 sebesar 74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh) meningkat menjadi 75,67 (tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh) pada tahun 2024. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 selalu berada di atas rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 2.3 IPM Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

2.1.5. Produk Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh Daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan. Penentuan produk unggulan Kabupaten Semarang dilakukan dengan metode penilaian terhadap karakteristik produk yang dianggap unggul di Daerah tersebut.

Berdasarkan analisis LQ (*Location Quotient*) Kabupaten Semarang pada PDRB Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdapat beberapa sektor yang menjadi basis di Kabupaten Semarang. Sektor-sektor tersebut meliputi *real estate* dengan nilai 1,73; jasa perusahaan dengan nilai 1,33; konstruksi dengan nilai 1,28; jasa keuangan dan asuransi dengan nilai 1,25; industri pengolahan dengan nilai 1,16; pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang dengan nilai 1,10; dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai 1,03. Merujuk rerata LQ tersebut, dirumuskan hasil penentuan produk unggulan Kabupaten Semarang, yakni industri pengolahan, pertanian unggulan, dan sektor pariwisata.

Kabupaten Semarang memiliki sejumlah Produk Unggulan Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi pengungkit bagi perekonomian daerah. Produk unggulan Daerah tersebut terbagi pada sejumlah sektor pembangunan. Untuk sektor pertanian, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi unggulan yaitu Alpukat (99.517 kuintal/tahun), Durian (91.717 kuintal/tahun), Krisan (129.658.173 tangkai/tahun), Cabai Keriting (158.873 kuintal/tahun) dan Cabai Rawit (176.310 kuintal/tahun). Sedangkan sektor peternakan terdapat komoditas unggulan susu sapi (17.213.070 liter/tahun) serta pada sektor perkebunan terdapat komoditas unggulan kopi (2.258.815,24 kg/tahun).

Produk Unggulan Daerah Kabupaten Semarang yang berasal dari industri pengolahan yaitu Aneka Kripik Karangbolo (900 kg/bulan), Kerajinan Enceng Gondok (1.220 buah/bulan), Tahu Serasi (2 ton/bulan), Tahu Bakso (89.000 dos/bulan), Olahan Kripik Ikan (150 kg/bulan) serta Batik (200 lembar/bulan).

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat dan sektor unggulan yang diharapkan mampu berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Semarang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang cukup besar melalui 51 Daya Tarik Wisata (DTW) dan 74 Desa Wisata sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0217/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Potensi DTW yang meliputi wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus, serta potensi desa wisata cukup besar. Secara umum destinasi wisata, desa wisata, dan infrastruktur pendukung masih belum optimal atau perlu ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang.

2.1.6. Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara visi pembangunan yang diinginkan untuk masa mendatang dengan realitas kondisi saat proses perencanaan sedang dilaksanakan. Guna mengurangi ketidaksesuaian tersebut, diperlukan upaya tindak lanjut melalui inovasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang kemudian diwujudkan dalam Rencana Induk Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan IPTEK Daerah (RIPJ-PID). Program penanganan isu wilayah di dalam RIPJ-PID ini mampu diintegrasikan dengan inisiatif pengembangan produk unggulan daerah atau program pembangunan yang selaras dengan tema prioritas, sehingga mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

Terdapat tujuh masalah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia berperan krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan investasi untuk mengembangkan SDM melalui pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan, sangat esensial guna membentuk masyarakat yang lebih unggul. Sehingga, pengelolaan SDM yang tepat sasaran menjadi elemen penentu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Tingkat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Semarang tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh) pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 75,67 (tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh) di tahun 2024, melebihi IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh tujuh) serta IPM nasional yang berada di angka 75,02 (tujuh puluh lima koma nol dua) pada periode yang sama. Pencapaian peningkatan IPM ini direalisasikan melalui upaya pemenuhan standar pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas unggul mampu mendorong peningkatan produktivitas wilayah, memperkuat daya saing, serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berpotensi tinggi guna menguasai kemajuan teknologi, yang dicapai melalui penguatan kualitas SDM digital yang fleksibel dan kompetitif di tingkat global.

b. Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Penguatan Kemandirian Pangan.

Peningkatan ekonomi di Kabupaten Semarang didasari pada potensi daerah setempat, yang tercermin dari berkembangnya kewirausahaan; pengelolaan pariwisata yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); serta lima sektor unggulan dalam PDRB berdasarkan ADHK 2010 yang mencatat pertumbuhan terbesar pada tahun 2024, yakni (1) Jasa Perusahaan (9,62%); (2) Informasi dan Komunikasi (9,23%); (3) Jasa Pendidikan (8,67%); (4) Jasa Konstruksi (7,81%); dan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,43%). Hampir seluruh lapangan usaha mengalami ekspansi positif, meskipun sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang justru mengalami penurunan sebesar -0,18%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang mencapai 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 4,73% (empat koma tujuh puluh tiga persen) di tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif didukung oleh stabilitas harga yang harus terus dijaga agar dapat memperkuat daya beli masyarakat, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan instrumen pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat kemampuan dan potensi suatu negara, organisasi, atau wilayah dalam menciptakan, menerapkan, serta memasyarakatkan inovasi. Indeks ini bertujuan menyajikan analisis menyeluruh mengenai keunggulan dan kekurangan dalam ekosistem inovasi, sekaligus menyediakan data bagi para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan kalangan akademik untuk merancang strategi yang efektif dalam memperkuat kapabilitas inovasi. Dengan mengukur beragam aspek terkait inovasi, indeks ini memfasilitasi identifikasi kekuatan serta kelemahan, memberikan fondasi bagi perbaikan dan pengambilan keputusan, di mana hingga tahun 2024 nilainya tercatat sebesar 2,83 (dua koma delapan puluh tiga).

c. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan secara keseluruhan, di mana peningkatan persentase terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,51% (tujuh koma lima puluh satu persen) dan naik menjadi 7,82% (tujuh koma delapan puluh dua persen) di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, sebelum turun menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) pada 2022 dan terus menurun hingga 6,96% (enam koma sembilan puluh enam persen) pada 2024; persentase ini secara konsisten lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional sejak 2013. Garis kemiskinan, sebagai indikator ambang batas pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi alat krusial untuk mengidentifikasi kelompok miskin dan merancang kebijakan pengurangan kemiskinan, meskipun menghadapi berbagai tantangan; hingga 2024, nilai garis kemiskinan tercatat Rp.520.640/kap/bulan (lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Sementara itu, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang pada 2023 mencapai 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen) atau 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) jiwa, lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,11% (satu koma sebelas persen), dengan penurunan 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen) atau 7.430 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh) jiwa.

Kemiskinan di Kabupaten Semarang dipicu oleh faktor seperti karakteristik dan budaya masyarakat, keterampilan yang terbatas, serta pendapatan rendah, di mana upaya pemerintah daerah belum mencapai hasil optimal dalam mengatasinya, termasuk distribusi beban masyarakat miskin pada aspek transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang belum merata. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara terintegrasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat menjangkau akar permasalahan secara tuntas dan efektif.

d. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur volume penawaran tenaga kerja yang belum dimanfaatkan atau terserap sepenuhnya oleh pasar kerja. Pada rentang waktu 2020-2024, TPT di Kabupaten Semarang menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun secara keseluruhan masih lebih rendah daripada angka di Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Lonjakan terjadi antara tahun 2019-2021 yang dipicu oleh pandemi Covid-19, sehingga mencapai 5,02% (lima koma nol dua persen) pada 2021, sebelum mengalami penurunan menjadi 3,73% (tiga koma tujuh puluh tiga persen) di tahun 2024. Fenomena pengangguran terbuka ini disebabkan oleh kurangnya sinergi optimal antara kebutuhan keterampilan tenaga kerja potensial dengan penyediaannya, serta ketidaksesuaian antara tuntutan dunia usaha dan industri dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada.

e. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing

Tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi daerah menjadi fondasi utama untuk mewujudkan administrasi yang efektif, efisien, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat, di mana implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang solid dan dorongan inovasi pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) memainkan peran krusial dalam memantau kemajuan birokrasi untuk membangun kepercayaan publik, dengan capaian

Kabupaten Semarang pada 2024 mencapai 77,87 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tujuh), meskipun reformasi ini belum optimal akibat kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan berbasis elektronik, satu data, riset inovasi, serta pembangunan kemandirian desa yang masih terbatas. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui teknologi informasi dan komunikasi, dengan indeks 2024 sebesar 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) yang menyandang predikat baik.

Indeks Keterbukaan Publik mengukur tingkat aksesibilitas, kualitas, dan relevansi informasi yang disediakan pemerintah kepada masyarakat, berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, di mana Kabupaten Semarang mencapai 100% (seratus persen) pada 2024 meskipun menghadapi tantangan implementasi. Indeks Pelayanan Publik (IPP) menilai kinerja layanan publik untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, transparansi, dan kepuasan masyarakat, dengan nilai 4,5 (empat koma lima) pada 2024 yang memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan dan pembangunan. Sementara itu, Indeks Reformasi Hukum mengevaluasi kemajuan sistem hukum termasuk kebijakan, regulasi, dan implementasi untuk mempromosikan keadilan dan partisipasi, di mana capaian 100 (seratus) pada 2024 menandakan kemajuan substansial dalam penguatan tata kelola dan demokrasi partisipatif.

f. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Semarang mengalami penurunan signifikan dari 69,12 (enam puluh sembilan koma dua belas) pada tahun 2020 menjadi 66,49 (enam puluh enam koma empat puluh sembilan) pada 2024, yang mencerminkan degradasi lingkungan akibat pencemaran air dan udara serta berkurangnya tutupan lahan, sehingga pencapaian IKLH belum mencapai target optimal. Selain itu, produksi sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang pesat, di mana pengelolaan melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat, sehingga hanya 14,39% (empat belas koma tiga puluh sembilan persen) timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan pada 2024. Upaya mitigasi perubahan iklim juga menjadi prioritas melalui kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 24.386,81 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan satu) TonCO₂eq pada 2024, yang melibatkan komitmen nasional dan internasional melalui berbagai strategi pengurangan emisi.

Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Semarang telah mencapai 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) untuk rumah tangga secara keseluruhan hingga 2024, meskipun hanya 42,40% (empat puluh dua koma empat puluh persen) rumah tangga perkotaan yang memiliki akses air siap minum melalui perpipaan, menjadikan penyediaan air bersih sebagai isu lingkungan krusial untuk lima tahun mendatang. Di sisi lain, daerah ini memiliki

potensi besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan dukungan pemerintah untuk memanfaatkan energi panas bumi di kawasan Candi Umbul Telomoyo, serta sumber daya lain seperti energi surya, mikro hidro, biogas, dan biomassa guna mendukung transisi energi berkelanjutan.

g. Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan alat pengukuran yang dirancang untuk mengilustrasikan tingkat kerentanan bencana di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan membekali pemerintah, organisasi, dan masyarakat pemahaman mendalam tentang risiko tersebut guna mendukung strategi mitigasi, perencanaan, serta penanganan bencana yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), IRBI Kabupaten Semarang pada tahun 2020 berada dalam kategori tinggi dengan nilai 143,2 (seratus empat puluh tiga koma dua), kemudian menurun ke kelas risiko sedang sebesar 118,89 (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan) pada 2021, diikuti penurunan lebih lanjut menjadi 101,79 (seratus satu koma tujuh puluh sembilan) pada 2022, 89,67 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh) pada 2023, dan mencapai 80,78 (delapan puluh koma tujuh puluh delapan) pada 2024, menandakan perbaikan signifikan dalam pengelolaan risiko bencana.

Angka kriminalitas di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dari 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) kasus pada tahun 2020 menjadi 221 (dua ratus dua puluh satu) kasus pada 2024, yang mencerminkan kemajuan dalam penegakan hukum meskipun fluktuasi di tahun-tahun tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan keamanan, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan penguatan upaya pencegahan kriminalitas melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, guna meminimalkan dampak faktor-faktor eksternal yang dapat memicu peningkatan kasus di masa depan.

2.2. Kondisi Riset Dan Inovasi Di Daerah

2.2.1. Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Salah satu poin penting yang diidentifikasi dari kondisi Riset dan Inovasi di Daerah yakni kemampuan Daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hal ini penting untuk menjawab berbagai isu strategis ataupun permasalahan yang ada dalam berbagai sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Kemampuan ini dapat dilihat dalam 3 aspek antara lain:

1. Sumber Daya Riset dan Inovasi Daerah

- a. Ketersediaan sumber daya manusia Iptek di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Semarang

Sumber Daya Manusia Iptek terdiri dari kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, fungsional peneliti, fungsional perencana, pranata komputer, arsiparis, serta staf dengan total sebanyak 36 orang. Rincian SDM Iptek di BAPPERIDA Kabupaten Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sumber Daya Manusia Iptek BAPPERIDA Kabupaten Semarang Tahun 2024

NO	Pejabat Fungsional	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretaris dan Kabid	5
3.	Kasubag	3
4.	Peneliti	1
5.	Perencana	12
6.	Pranata Komputer	3
7.	Arsiparis	1
8.	Staf	10
Jumlah		36

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Semarang, 2025

Sumber daya manusia Iptek, khususnya pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Semarang terdiri dari 1 pejabat struktural Kepala Bidang, 1 Peneliti yang merupakan hasil penyetaraan jabatan, 1 Analis Perencana, dan 1 staf.

Sumber daya Iptek di Kabupaten Semarang juga didukung dari Perguruan Tinggi, antara lain dari 3 Perguruan Tinggi terbesar di Kabupaten Semarang yakni Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) dan Universitas Ngudi Waluyo

Jumlah dosen di perguruan tinggi tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Semarang Tahun 2024

NO	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen
1.	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	67
2.	Universitas Ngudi Waluyo	163
Jumlah		230

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

- b. Ketersediaan infrastruktur Riset dan Inovasi, di antaranya:
- 1) Laboratorium Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - 2) Laboratorium Pakan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;
 - 3) Laboratorium Kultur dan Jaringan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;
 - 4) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;

- 5) Laboratorium Pengujian Bangunan Sipil milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
 - 6) Laboratorium Kesehatan Daerah milik Dinas Kesehatan.
- c. Kebijakan dan Program Riset dan Inovasi Daerah yang Pernah Dilaksanakan

Kabupaten Semarang telah melaksanakan Kebijakan Penguatan SIDA melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Roadmap Penguatan Sistem SIDA Kabupaten Semarang Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Semarang juga berupaya mendorong budaya Inovasi di masyarakat maupun Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang Menyelenggarakan Inovasi Daerah yang Berhasil Diterapkan di Kabupaten Semarang.

2. Kelembagaan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kelitbangan di tingkat kabupaten dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Semarang, diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Semarang.

Penyelenggaraan kelitbangan diamanatkan kepada Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas BAPPERIDA pada urusan penelitian dan pengembangan. Di samping kelembagaan yang terdapat dalam internal BAPPERIDA, Kabupaten Semarang juga membentuk Tim Kelitbangan Daerah. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Tim Kelitbangan Daerah beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Semarang.

Di samping itu, infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan. Rincian infrastruktur dari kedua dinas akan dijelaskan di bawah ini:

a. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja mendukung Riset dan Inovasi melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK). Program pelatihan yang terdapat di UPTD BLK antara lain:

- 1) Asisten pembuat pakaian (garmen);
- 2) Menjahit pakaian wanita dewasa (modiste);
- 3) Pembuatan roti dan kue;
- 4) Tata rias pengantin;
- 5) Mekanik mobil dan sepeda motor.

b. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mendukung Riset dan Inovasi melalui 4 UPTD untuk melakukan pengembangan pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Semarang yakni:

- 1) UPTD Sub Terminal Agribisnis (STA) Jetis;
- 2) UPTD Pembibitan Pertanian;
- 3) UPTD Pasar Hewan, RPH dan Puskeswan;
- 4) UPTD Balai Benih Ikan.

3. Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Semarang telah membangun jejaring Riset dan Inovasi melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan instansi terkait, baik yang terdapat di Daerah maupun luar daerah, di antaranya:

- a. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman;
- b. Universitas Ngudi Waluyo;
- c. Universitas STEKOM Ungaran;
- d. STT Abdiel Ungaran;
- e. STT Kanaan Nusantara;
- f. STT Simpson;
- g. STT Sangkakala Getasan;
- h. Universitas Kristen Satya Wacana;
- i. Universitas Negeri Semarang;
- j. Universitas Semarang;
- k. Universitas Diponegoro;
- l. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
- m. Universitas PGRI Semarang;
- n. Universitas Muhammadiyah Semarang;
- o. UIN Salatiga.

Ruang lingkup kerja sama antara Kabupaten Semarang dengan instansi terkait, meliputi:

- a. Kerja sama dengan perguruan tinggi yang dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlaku hingga lima tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2025 hingga 2029 (Humas, 2023).
- b. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen.
- c. Kerja sama dengan PT. Sido Muncul melalui Program Desa Rempah yang berlokasi di Desa Bergas Kidul, Desa Diwak dan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas.
- d. Kerja sama Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam rangka kerja sama promosi wisata dengan sasaran biro wisata, dengan lokasi sasaran wisata yakni Saloka, Cimory, Umbul Sidomukti, dan Banaran.

Berdasarkan ketersediaan SDM Iptek dan manajemen Iptek, kondisi kelembagaan dan infrastruktur Riset dan Inovasi, serta kemampuan Daerah dalam membangun jejaring Riset dan Inovasi, artinya Kabupaten

Semarang memiliki kemampuan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti (*Evidence-Based Policy*).

2.2.2. Penentuan Tema Prioritas Penguatan Riset dan Inovasi

Penentuan tema prioritas bagi penguatan Riset dan Inovasi pada Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek diselaraskan dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar penguatan Riset dan Inovasi dapat mendukung keberhasilan akan pencapaian misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Periodisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai bagian dari periode pembangunan jangka menengah Daerah dalam tahun 2025 hingga 2029.

Dalam rangka memastikan keberhasilan pembangunan daerah, maka tema prioritas Riset dan Inovasi ditetapkan untuk mendukung salah satu visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Semarang yaitu “Kabupaten Semarang yang Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan” dan pada misi “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” serta arah kebijakan lima tahun pertama yakni tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan “Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdaya Saing”. Dengan demikian, tema prioritas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah **“Riset dan Inovasi Menuju Kabupaten Semarang Berdaya Saing”**.

2.2.3. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah

Berdasarkan tema prioritas Riset dan Inovasi yang sudah dipilih, maka dilakukan identifikasi terhadap kondisi ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang, untuk melihat daya dukung ekosistem di Daerah terhadap upaya penguatan Riset dan Inovasi yang akan dilakukan. Proses identifikasi kondisi ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dilakukan dengan berfokus pada pengembangan ekonomi Daerah melalui penguatan Produk Unggulan Daerah dengan memanfaatkan hasil-hasil Riset dan Inovasi, baik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga Riset lainnya serta masyarakat sebagai pelaku usaha.

Analisis kebutuhan pengembangan PUD berdasarkan penguatan 6 (enam) elemen ekosistem Riset dan Inovasi di daerah, sesuai dengan acuan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, terdiri atas Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah, dan Penyelarasan dengan Perkembangan Global. Adapun kondisi ekosistem Riset dan Inovasi sesuai dengan tema prioritas yang dianalisis dengan menggunakan 6 elemen berikut ini:

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Infrastruktur dasar Riset dan Inovasi menjadi salah satu input penting dalam ekosistem Riset dan Inovasi, terutama dalam menunjang dan meningkatkan pelaksanaan Riset serta penciptaan Inovasi dan teknologi. Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang melibatkan

sejumlah perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan lembaga Riset. Dalam rangka mendukung kebijakan Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang sudah memiliki beberapa regulasi diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah yang menjadi landasan hukum bagi pelaku Inovasi .

Pada sektor pengembangan industri, telah disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039, sedangkan dari sektor pengembangan pariwisata sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Selain itu dari sektor pertanian terdapat Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Semarang yang menjadi pendamping petani dalam menerapkan Iptek di bidang pertanian.

Guna mewujudkan peran Riset dan Inovasi yang optimal, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan data dan informasi Riset dan Inovasi sebagai bahan referensi terhadap perencanaan pembangunan, oleh karena itu, BAPPERIDA Kabupaten Semarang sudah memiliki aplikasi SITALITBANG merupakan sistem informasi pemetaan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diakses melalui <http://sitalitbang.semarangkab.go.id/>. Kabupaten Semarang juga telah memiliki portal *database* yang dapat diakses secara daring melalui internet yakni <https://data.semarangkab.go.id/> yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas dan mudah diakses, dan siap dipakai antar semua perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.

Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi melalui anggaran program penelitian dan pengembangan pada BAPPERIDA Kabupaten Semarang tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp587.143.000,00, anggaran tersebut salah satunya digunakan dalam memfasilitasi hilirisasi Riset Inovasi yang perlu melalui sosialisasi hak kekayaan intelektual .

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset serta Inovasi dalam Peta Jalan Pemajuan Riset Daerah mencakup penguatan lembaga Riset lokal, universitas, dan institusi pemerintah Daerah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan jejaring kolaborasi antara lembaga Riset , industri, dan pemerintah Kabupaten Semarang sudah terjalin diantaranya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Universtas PGRI Semarang, Universitas STEKOM Ungaran dan PT. Sidomuncul.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah sangat penting untuk memperkuat daya saing Daerah melalui sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat. Salah satunya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BRIN serta pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi dan survei padi biofortifikasi di Kabupaten Semarang di Ungaran Timur, Ambarawa, dan Pabelan. Dalam mendukung sektor pariwisata, Desa Kesongo menjadi percontohan Desa Riset yang

berfokus pada Inovasi tanaman padi apung sekaligus pengembangan budidaya perikanan dengan menggunakan energi terbarukan. Program ini melibatkan Pemerintah Desa Kesongo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, BRIN, dan PT Shams Energy.

Kabupaten Semarang juga melaksanakan program difusi Inovasi teknologi pertanian melalui Petugas Penyuluh Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani). Peran penyuluh pertanian sebagai pelaku pendamping para petani yang secara aktif menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program *Good Agriculture Practice* (GAP) menuju pertanian organik.

Fasilitasi praktik berwirausaha secara digital oleh dinas terkait berupa pendampingan dalam promosi produk menggunakan smartphone, pendaftaran lokasi usaha di *Google Map*, dan promosi di *Facebook Marketplace* selama 4 bulan baik teori dan praktik sampai dengan proses penjualan produk yang telah diciptakan.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya Riset dan Inovasi di Daerah perlu ditanamkan melalui upaya yang sistematis, dimulai dari pendidikan hingga keterlibatan masyarakat. Untuk mendorong budaya Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) tingkat Kabupaten dengan kategori Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Umum Masyarakat dan Pelajar (SMP dan SMA) sebagai wadah pemberian apresiasi prestasi Inovasi bagi inovator. Pemerintah Kabupaten Semarang juga mengikuti Pameran Produk Inovasi (PPI) Tingkat Jawa Tengah untuk memfasilitasi inventor dalam mensosialisasikan Inovasi nya.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan Program Sekolah Tani Milenial yang melibatkan generasi muda dan mempromosikan pertanian organik. Selain itu, Kabupaten Semarang berpartisipasi dalam *Jateng Agroinnovation Expo*, expo Inovasi dan teknologi pertanian terbesar di Jawa Tengah untuk mendiseminasikan hasil Riset dan Inovasi di sektor pertanian.

Sebagai upaya pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) terdapat Kabupaten Semarang sejak tahun 2022 telah mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) telah membina usaha mikro mencapai 19.180 pada tahun 2023. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian lokal.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah mengacu pada sinergi antara berbagai sektor antara lain pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem Riset yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam permasalahan sektor pertanian berupa keterbatasan SDM dalam mengelola lahan pertanian, Pemerintah

Kabupaten Semarang bekerja sama dengan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) Citra Muda untuk mengadakan Program Sekolah Tani Milenial yang menggandeng kaum milenial. UMKM Center Kabupaten Semarang juga menggelar pertemuan rutin dengan mengadakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan klaster bidang usaha di Kabupaten Semarang. Fasilitas pelatihan dari Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bentuk pengembangan berbagai klaster, mulai dari klaster kemasan kering, kemasan basah, kuliner, kopi, kerajinan, *fashion*, dan klaster barang serta jasa.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan dengan perkembangan global dalam pemajuan Riset Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa Daerah tidak tertinggal dalam Inovasi dan teknologi. Daerah harus aktif mengikuti tren Riset global dengan menyesuaikan prioritas Riset lokal terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, digitalisasi, kesehatan, dan energi terbarukan yang sedang berkembang di kancah internasional. Saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang saat masih belum optimal dalam mengikuti perkembangan global karena belum adanya kerjasama internasional baik dalam bidang teknologi maupun Riset . Hal tersebut perlu membuka peluang kerjasama dengan lembaga Riset internasional, fasilitasi akses ke jaringan global serta mendorong adopsi teknologi terbaru. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global melalui pelatihan dan program pertukaran. Dengan memanfaatkan perkembangan global dapat mempercepat Inovasi lokal yang relevan dan berdampak positif pada pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut disusunlah tabel yang memuat mengenai tema yang dipilih sebagai prioritas penguatan Riset dan Inovasi untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang Daerah dengan identifikasi kondisi ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan 6 elemen penguatan. Pada masing-masing elemen penguatan ekosistem Riset dan Inovasi ditentukan sejumlah kondisi ekosistem Riset dan Inovasi untuk setiap produk unggulan Daerah prioritas, dan permasalahan yang dipilih sebagai prioritas. Berikut akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Tema Prioritas & Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi

Tema Prioritas Ekosistem Riset dan Inovasi Saat Ini di Daerah
<p>Tema rioritas Riset dan Inovasi Kabupaten Semarang adalah “Riset dan Inovasi Menuju Kabupaten Semarang Berdaya Saing”. Tema prioritas ini ditetapkan berdasarkan salah satu misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Semarang, salah satunya yakni “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” serta salah satu misi pembangunan jangka menengah Daerah yakni “Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Industri, Pertanian, dan Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan, Jasa, serta Sektor Lain yang Berwawasan Lingkungan”.</p>

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Yang Mendukung
Penguatan Tema Prioritas

A Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

No	Area Kondisi	Indikator	Kondisi Saat Ini
1.	Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Kebijakan yang mendukung	<p>a. Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.</p> <p>b. Kabupaten Semarang belum memiliki Rencana Induk terkait sektor pertanian</p> <p>c. Kabupaten Semarang sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025</p>
2.	Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	Database Portal	<p>a. Kabupaten Semarang sudah memiliki portal database, yang dapat diakses secara daring melalui Satu Data Kabupaten Semarang: https://data.semarangkab.go.id/</p> <p>b. Sistem informasi pemetaan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diakses melalui http://sitalitbang.semarangkab.go.id/</p>
3.	Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	Infrastruktur Riset dan Inovasi	<p>a. Laboratorium Pakan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p> <p>b. Laboratorium Kultur dan Jaringan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p> <p>c. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p>

			d. Infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Daerah yang ada di Perguruan Tinggi
4.	Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Alokasi Anggaran	<p>a. Kabupaten Semarang tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp587.143.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)</p> <p>b. Kabupaten Semarang tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp497.054.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)</p>
5.	Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Hak Kekayaan Intelektual	<p>a. Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang IDG000000127</p> <p>b. Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan juga memfasilitasi permohonan perlindungan merk yang diajukan oleh UMKM</p> <p>c. Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan fasilitasi HAKI berupa Hak Cipta Tari Pesona Desa Lerep “Tari Caping Gangsing”</p>
B Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
1	Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	Kolaborasi Riset dan Inovasi	Pengembangan kolaborasi antara lembaga Riset , industri, dan pemerintah Kabupaten Semarang sudah terjalin diantaranya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Universtas PGRI Semarang, Universitas STEKOM Ungaran dan PT. Sidomuncul.

2	Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi	Sarana Pendukung Riset dan Inovasi	Masih kurangnya sarana pendukung Riset dan Inovasi daerah
C Kemitraan Riset dan Inovasi dan Inovasi			
1	Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan	Kemitraan Riset dan Inovasi	<p>a. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BRIN serta pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi dan survei padi biofortifikasi di Kabupaten Semarang di Ungaran Timur, Ambarawa, dan Pabelan</p> <p>b. Desa Kesongo menjadi percontohan Desa Riset yang berfokus pada Inovasi tanaman padi apung sekaligus pengembangan budidaya perikanan dengan menggunakan energi terbarukan yang melibatkan Pemerintah Desa Kesongo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, BRIN, dan PT Shams Energy.</p>
2	Peningkatan Difusi Inovasi	Difusi Inovasi	Belum optimalnya difusi Inovasi di Kabupaten Semarang
3	Peningkatan Praktik Baik dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi	Diseminasi Inovasi	Belum optimalnya diseminasi hasil Riset dan Inovasi
D Budaya Riset dan Inovasi			
1	Promosi dan Kampanye Inovasi	Pameran Riset dan Inovasi	<p>a. Pemerintah Kabupaten Semarang juga mengikuti Pameran Produk Inovasi (PPI) Tingkat Jawa Tengah untuk memfasilitasi inventor dalam mensosialisasikan Inovasi nya</p> <p>b. Kabupaten Semarang berpartisipasi dalam Jateng Agroinnovation Expo, expo Inovasi dan teknologi pertanian terbesar di Jawa Tengah untuk mendiseminasikan hasil Riset</p>

			dan Inovasi di sektor pertanian
2	Apresiasi Prestasi Inovasi	Lomba Riset dan Inovasi	Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten dengan kategori Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Umum Masyarakat dan Pelajar (SMP dan SMA) sebagai wadah pemberian apresiasi prestasi Inovasi bagi inovator.
3	Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Penumbuhan Pengusaha Baru	a. Kabupaten Semarang sejak tahun 2022 telah mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) telah membina usaha mikro mencapai 19.180 pada tahun 2023. b. Pembinaan pengelolaan usaha baru sektor pariwisata pada Desa Wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
E Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
1	Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi PUD dan/atau Mengatasi Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa Riset dan Inovasi	a. Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) Citra Muda untuk mengadakan Program Sekolah Tani Milenial yang menggandeng kaum milenial. b. UMKM Center Kabupaten Semarang juga menggelar pertemuan rutin dengan mengadakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan klaster bidang usaha di Kabupaten Semarang.
2	Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis PUD	Pengembangan klaster ekonomi kreatif	Kabupaten Semarang telah membentuk komunitas ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 klaster namun belum berkembang secara optimal.

3	Kesesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemda	Sinkronisasi kebijakan	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan pemerintahan pusat dan Daerah sektor pertanian, umkm maupun pariwisata.
F	Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
1	Peningkatan Kepedulian Isu Internasional yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Isu-isu internasional	Kabupaten Semarang berupaya menjawab tantangan global di sektor pertanian, UMKM dan pariwisata namun belum optimal
2	Penguatan Kerjasama Internasional	Kerjasama Internasional	Belum adanya kerjasama internasional baik dalam bidang teknologi maupun Riset di sektor pertanian, UMKM dan pariwisata namun belum optimal

BAB III
TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

3.1. Tantangan dan Peluang Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Semarang disusun sebagai upaya untuk memastikan agar penguatan Riset dan Inovasi dapat mendukung keberhasilan pencapaian misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dipergunakan sebagai alat dalam perumusan kondisi ekonomi Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang dengan menghasilkan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Daerah ke depan, dalam mengembangkan produk unggulan Daerah melalui penguatan Riset dan Inovasi.

Tabel 3. 1 Tantangan dan Peluang Ekosistem Riset dan Inovasi

TANTANGAN	PELUANG
1) Minimnya anggaran untuk penelitian lokal, terutama pada sektor yang membutuhkan pengembangan teknologi dan PUD	1) Potensi produk unggulan lokal dalam pengembangan Riset (pertanian, olahan hasil pertanian, dan pariwisata)
2) Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang potensi Daerah (INTANPARI)	2) Dukungan kebijakan nasional, seperti alokasi dana Riset dan Inovasi
3) Infrastruktur penelitian yang belum optimal dalam mendorong penelitian inovatif	3) Kemajuan teknologi digital membuka peluang dalam pengembangan Inovasi di segala sektor
4) Rendahnya budaya Inovasi yang berimbas pada minimnya partisipasi dalam program Riset	4) Kemitraan dengan institusi pendidikan
5) Kurangnya integrasi dengan program global, dilihat dari belum banyaknya hasil Riset yang terhubung dengan isu-isu global	5) Akses pasar global melalui strategi pemasaran digital dapat membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis ekspor
6) Regulasi yang kurang mendukung dalam pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi, termasuk intesif bagi pelaku Inovasi lokal	6) Kesadaran pariwisata berkelanjutan, membuka peluang pengembangan Riset Inovasi di sektor pariwisata desa dan ekowisata
7) Tidak sinkronnya data antar lembaga/dinas sehingga membuat proses Riset dan Inovasi terhambat	7) Dukungan lembaga internasional, termasuk dukungan pendanaan guna mendukung Riset dan Inovasi terkait pembangunan berkelanjutan
	8) Ekonomi kreatif berpotensi dikembangkan melalui Riset inovatif yang menggabungkan aspek tradisional dan teknologi modern

BAB IV
ANALISIS KESENJANGAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pada setiap area penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dilakukan analisis baik terhadap kondisi saat ini di daerah, kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah daerah, untuk menentukan kebutuhan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi, dengan penjabaran sebagai berikut ini

Tabel 4. 1 Tema Prioritas Ekosistem Riset dan Inovasi serta Analisis Kesenjangan

Tema Prioritas Ekosistem Riset dan Inovasi Saat Ini di Daerah
<p>Tema rioritas Riset dan Inovasi Kabupaten Semarang adalah “Riset dan Inovasi Menuju Kabupaten Semarang Berdaya Saing”.</p> <p>Tema prioritas ini ditetapkan berdasarkan salah satu misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Semarang, salah satunya yakni “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” serta salah satu misi pembangunan jangka menengah Daerah yakni “Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Industri, Pertanian, dan Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan, Jasa, serta Sektor Lain yang Berwawasan Lingkungan”.</p>

A. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1.	Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. b. Kabupaten Semarang belum memiliki Rencana Induk terkait sektor pertanian c. Kabupaten Semarang sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 	Tersusunnya kebijakan pengembangan produk unggulan Daerah sektor pertanian, umuk dan industri kreatif serta pariwisata	Belum adanya kebijakan spesifik untuk mendorong Riset dan Inovasi pengembangan produk unggulan Daerah sektor pertanian, umkm dan industri kreatif serta pariwisata

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
		Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025		
2.	Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	<p>a. Kabupaten Semarang sudah memiliki portal database, yang dapat diakses secara daring melalui Satu Data Kabupaten Semarang: https://data.semarangkab.go.id/</p> <p>b. Sistem informasi pemetaan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diakses melalui http://sitalitbang.semarangkab.go.id/</p>	Terbentuknya platform digital yang mengintegrasikan data produk unggulan, pelaku usaha, dan peluang pasar serta pemanfaatan Riset serta Inovasi yang sudah dilakukan.	Minimnya sistem data yang terpusat untuk mendukung Riset dan Inovasi di produk unggulan daerah
3.	Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	<p>a. Laboratorium Pakan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p> <p>b. Laboratorium Kultur dan Jaringan milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p> <p>c. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner milik</p>	Terciptanya kolaborasi pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi produk unggulan Daerah sektor pertanian, umkm dan industri kreatif serta pariwisata	Kurangnya kolaborasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung pelaku Riset dan Inovasi .

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
		<p>Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang</p> <p>d. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM)</p> <p>e. Infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Daerah yang ada di Perguruan Tinggi</p>		
4.	Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	<p>a. Kabupaten Semarang tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp587.143.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)</p> <p>b. Kabupaten Semarang tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp497.054.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)</p>	Tersedianya dana yang memadai untuk Riset dan Inovasi, khususnya untuk pengembangan produk unggulan Daerah baik dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah maupun CSR	Kurangannya anggaran yang mendukung Riset dan rInovasi daerah.
5.	Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	a. Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual berupa	Peningkatan jumlah produk unggulan Daerah yang bersertifikasi HAKI	Rendahnya kesadaran dan akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
		<p>Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang IDG000000127</p> <p>b. Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan juga memfasilitasi permohonan perlindungan merk yang diajukan oleh UMKM</p> <p>c. Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan fasilitasi HAKI berupa Hak Cipta Tari Pesona Desa Lerep “Tari Caping Gangsing”</p>		

B. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1	Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	Pengembangan kolaborasi antara lembaga Riset , industri, dan pemerintah Kabupaten Semarang sudah terjalin diantaranya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),	Terciptanya kolaborasi pentahelix dalam upaya meningkatkan serta mengembangkan Riset dan Inovasi produk unggulan daerah	Kurangnya platform atau ruang untuk kolaborasi lintas sektor.

		Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Universtas PGRI Semarang, Universitas STEKOM Ungaran dan PT. Sidomuncul.		
2	Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi	Masih kurangnya sarana pendukung Riset dan Inovasi daerah	Tersedianya sarana pendukung Riset dan Inovasi produk unggulan Daerah di Kabupaten Semarang, melalui kerja sama antar segenap pemangku kepentingan.	Kurangnya akses ke sarana pendukung yang relevan dan ramah teknologi untuk Riset dan Inovasi produk unggulan Daerah

C. Kemitraan Riset dan Inovasi

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1	Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan	<p>a. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BRIN serta pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi dan survei padi biofortifikasi di Kabupaten Semarang di Ungaran Timur, Ambarawa, dan Pabelan</p> <p>b. Desa Kesongo menjadi percontohan Desa Riset yang berfokus pada Inovasi</p>	Penerapan kemitraan Riset dan Inovasi antara pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga Riset dan komunitas masyarakat untuk penguatan produk unggulan daerah.	Belum optimalnya kolaborasi kemitraan Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
		<p>tanaman padi apung sekaligus pengembangan budidaya perikanan dengan menggunakan energi terbarukan yang melibatkan Pemerintah Desa Kesongo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, BRIN, dan PT Shams Energy.</p>		
2	Peningkatan Difusi Inovasi	Belum optimalnya difusi Inovasi di Kabupaten Semarang	Model dan strategi transfer teknologi yang diterapkan untuk produk unggulan Daerah agar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.	Belum optimalnya penerapan model dan strategi transfer teknologi untuk produk unggulan daerah
3	Peningkatan Praktik Baik dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi	Belum optimalnya diseminasi hasil Riset dan Inovasi	Adanya forum tahunan yang menampilkan produk unggulan berbasis Riset dan Inovasi dan adanya seminar berupa praktik dalam mendukung pemberdayaan SDM	Kurangnya sarana untuk menyebarluaskan praktik baik secara rutin dan terorganisasi.

D. Budaya Riset dan Inovasi

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1	Promosi dan Kampanye Inovasi	<p>a. Pemerintah Kabupaten Semarang juga mengikuti Pameran Produk Inovasi (PPI) Tingkat Jawa Tengah untuk memfasilitasi inventor dalam mensosialisasikan Inovasi nya</p> <p>b. Kabupaten Semarang berpartisipasi dalam Jateng Agroinnovation Expo, expo Inovasi dan teknologi pertanian terbesar di Jawa Tengah untuk mendiseminasikan hasil Riset dan Inovasi di sektor pertanian</p>	Peningkatan promosi dan kampanye Inovasi kepada pelaku usaha terkait pengembangan produk unggulan Daerah pada pameran Inovasi	Rendahnya kesadaran publik terhadap potensi Inovasi produk unggulan daerah.
2	Apresiasi Prestasi Inovasi	Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten dengan kategori Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Umum Masyarakat dan Pelajar (SMP dan SMA) sebagai wadah pemberian	Adanya lomba kreativitas dan Inovasi yang berfokus pada pengembangan produk unggulan daerah.	Belum optimalnya lomba kreativitas dan Inovasi yang berfokus pada pengembangan produk unggulan daerah.

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
		apresiasi prestasi Inovasi bagi inovator.		
3	Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	<p>a. Kabupaten Semarang sejak tahun 2022 telah mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) telah membina usaha mikro mencapai 19.180 (sembilan belas ribu seratus delapan puluh) pada tahun 2023.</p> <p>b. Pembinaan pengelolaan usaha baru sektor pariwisata pada Desa Wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.</p>	Terciptanya <i>Start Up</i> bisnis dalam mendukung Riset dan Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Masih rendahnya dukungan kepada <i>startup</i> bisnis berbasis produk unggulan daerah

E. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1	Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi PUD dan/atau Mengatasi Permasalahan Utama Daerah	<p>a. Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) Citra Muda untuk mengadakan Program Sekolah Tani Milenial yang menggandeng kaum milenial.</p> <p>b. UMKM Center Kabupaten Semarang juga menggelar pertemuan rutin dengan mengadakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan klaster bidang usaha di Kabupaten Semarang.</p>	Terciptanya platform promosi digital berbasis smart economy untuk produk unggulan daerah	Sudah terdapat platform promosi digital walaupun belum secara maksimal tersebar dan tersampaikan oleh masyarakat
2	Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis PUD	Kabupaten Semarang telah membentuk komunitas ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 klaster namun belum berkembang secara optimal.	Adanya klaster Inovasi yang fokus pada pengembangan produk unggulan daerah	Belum adanya fokus strategi dan manajemen klaster yang relevan dengan produk unggulan daerah
3	Kesesuaian Kebijakan antara	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan	Integrasi kebijakan antara pemerintah pusat	Minimnya koordinasi antara kebijakan

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
	Pemerintah Pusat dan Pemda	pemerintahan pemerintah pusat dan Daerah sektor pertanian, umkm maupun pariwisata.	dengan pemerintah Daerah berbasis produk unggulan Daerah agar berhasil optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha	Daerah dan pusat untuk Inovasi di sektor unggulan.

F. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Kesenjangan
1	Peningkatan Kepedulian Isu Internasional yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Kabupaten Semarang berupaya menjawab tantangan global di sektor pertanian, UMKM, industri kreatif dan pariwisata namun belum optimal	Peningkatan standar kualitas produk unggulan Daerah untuk meningkatkan grade atau mutu produk unggulan daerah, sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya ke pasar global	Kurangnya edukasi dan akses informasi global untuk meningkatkan standar kualitas produk unggulan daerah
2	Penguatan Kerjasama Internasional	Belum adanya kerjasama internasional baik dalam bidang teknologi maupun Riset di sektor pertanian, UMKM, industri kreatif dan pariwisata namun belum optimal	Kerjasama internasional dalam pengembangan produk unggulan Daerah untuk memperkuat transfer teknologi dan akses pasar internasional.	Keterbatasan akses dan jejaring internasional bagi pelaku usaha.

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi Riset dan Inovasi di Daerah merupakan arah kebijakan yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam mendukung pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan Riset yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus mendorong lahirnya Inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Strategi Riset dan Inovasi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing Daerah melalui pengelolaan pengetahuan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan solusi berbasis penelitian.

Strategi Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kondisi ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang. Strategi ini selaras dengan analisis kesenjangan ekosistem Riset dan Inovasi daerah. Strategi ini memperkuat serta mengidentifikasi kebutuhan agar ekosistem Riset dan Inovasi Daerah menjadi lebih baik. Secara lengkap, strategi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang dijelaskan sebagai berikut.

1. Penguatan kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi
 - a. menyusun regulasi yang mendukung kerjasama antara sektor swasta, akademisi dan pemerintah;
 - b. menyediakan anggaran Riset serta mendorong pendanaan kolaboratif baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri maupun akademisi;
 - c. membangun portal atau platform digital untuk menampung data Riset dan Inovasi yang terintegrasi; dan
 - d. mengembangkan inkubator bisnis berbasis teknologi dan Inovasi dilengkapi dengan bimbingan teknis, pendanaan, serta jejaring pasar untuk mendorong hilirisasi hasil Riset menjadi produk bernilai ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Riset dan Inovasi
 - a. memberikan pelatihan penyusunan metodologi Riset , penulisan ilmiah, dan manajemen data;
 - b. mendorong kerja sama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan Inovasi ;
 - c. membuat forum rutin Riset dan Inovasi Daerah untuk mempertemukan peneliti, inovator dengan pelaku usaha dan pembuat kebijakan agar Riset dan Inovasi lebih aplikatif;
 - d. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan SDM.
3. Penguatan Riset dan Inovasi berbasis produk unggulan Daerah
 - a. melakukan pemetaan dan penentuan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah sektor pertanian, pariwisata, umkm serta industri kreatif;
 - b. membangun kerja sama Riset terapan antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk mempercepat Inovasi produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - c. memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi *startup* dan UMKM berbasis produk unggulan Daerah;

4. Komersialisasi dan hilirisasi produk unggulan Daerah
 - a. pelatihan pengembangan produk berbasis Riset dan Inovasi , *workshop* desain kemasan kreatif, edukasi dan pelatihan pemasaran digital, serta pendampingan branding produk.
 - b. Membangun branding yang kuat untuk produk unggulan Daerah dan mendapatkan sertifikasi yang diakui untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
 - c. Membangun jaringan kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholder* untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka peluang ekspor.
 - d. Memfasilitasi pelaku usaha dalam pemasaran produk dengan memanfaatkan *platform* digital untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, dan memudahkan akses konsumen terhadap produk unggulan Daerah.
 - e. Memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan insentif berbasis produk unggulan Daerah.
5. Penguatan kolaborasi dan kemitraan
 - a. Mendorong kemitraan lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media (*pentahelix*) untuk mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis Riset dan Inovasi .
 - b. Membentuk forum komunikasi atau konsorsium Riset yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga penelitian, UMKM, komunitas, dan mitra internasional, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peluang kerja sama.
 - c. membangun kolaborasi internasional dalam mengakses jaringan ekspor global berbasis produk unggulan Daerah.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

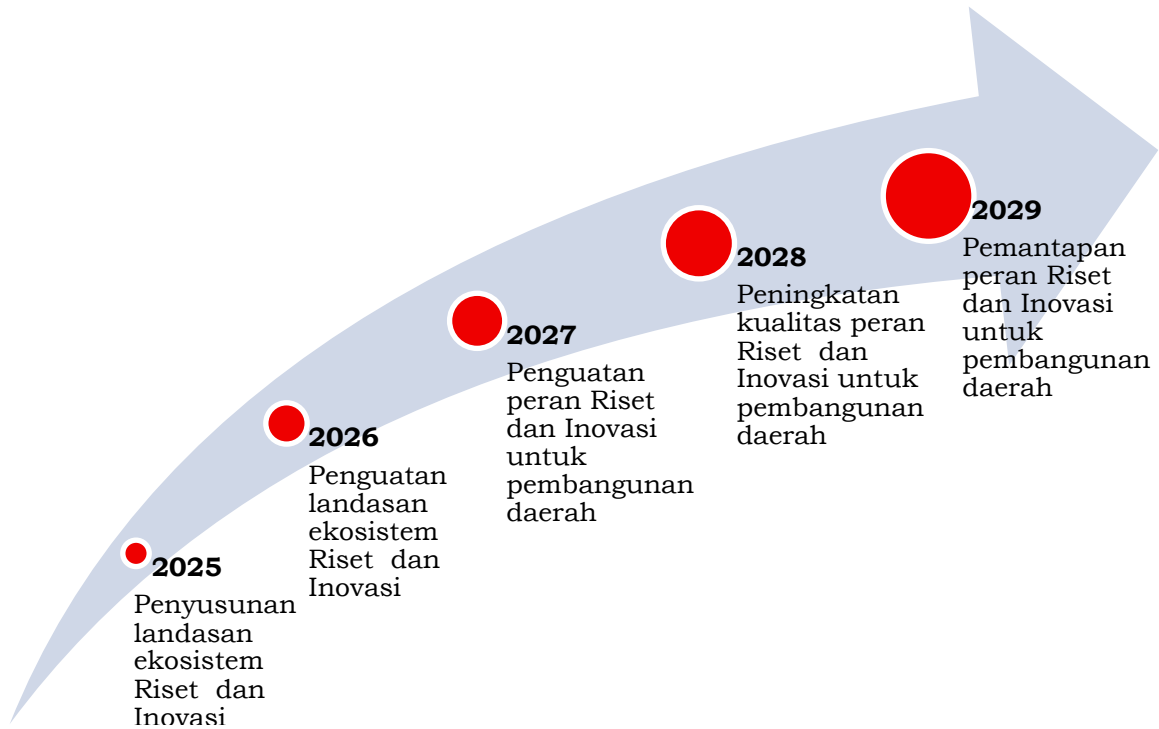
Keberhasilan pembangunan suatu Daerah sangat bergantung pada proses perencanaan dan kualitas kebijakan yang harus didasarkan pada data Riset dan Inovasi sebelumnya. Proses perencanaan dan penyusunan kebijakan yang berkualitas menjadi tantangan bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Semarang. Ciri kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang aplikatif dan didasarkan pada bukti-bukti yang terkini, relevan, representatif, dan valid. Riset dan Inovasi idealnya dilakukan untuk menyediakan bukti ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai target.

Riset dan Inovasi sebaiknya juga sejalan dengan isu strategis dan tujuan utama rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Semarang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata, data yang relevan, dan mendukung sistem pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti. Selain itu, Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis Riset, menghasilkan dampak positif, dan meningkatkan manfaat Riset bagi masyarakat dan pemerintah. Sistem difusi Inovasi dan diseminasi Riset juga dikembangkan untuk menyediakan acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.

Hasil Riset dan Inovasi yang didasarkan pada data masyarakat, analisis mendalam, dan Inovasi pengembangan mendukung Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menentukan arah pembangunan masa depan. Dalam konsep ini, masyarakat juga dilibatkan secara partisipatif dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi sehingga budaya Riset dan Inovasi tetap bertahan dan berkembang di Kabupaten Semarang. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang, sebagai pelaksana tata kelola Riset dan Inovasi, dapat menyediakan masukan berupa hasil Riset dan Inovasi yang relevan dengan sasaran utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang, bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan mitra lainnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan berbasis bukti dan pengetahuan dapat dihasilkan untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Semarang.

Peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah arah kebijakan yang menjabarkan tujuan, langkah-langkah, dan prioritas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Semarang selama 5 (lima) tahun kedepan. Peta jalan memuat sasaran strategis dengan berbasis Rancangan RPJMD Kabupaten Semarang. Berikut merupakan penjabarannya.

Gambar 4.1. Peta Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Semarang 2025-2029



Sumber: Tim Penyusun, 2025

Fokus pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Semarang tahun 2025 diarahkan pada penyusunan landasan ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi yang berorientasi pada kebutuhan Daerah. Proses ini dilakukan melalui pemetaan potensi dan tantangan Riset, penguatan peran lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta dunia usaha, sekaligus merancang mekanisme kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah daerah. Selain itu, penyusunan landasan ini juga bertujuan untuk menyiapkan regulasi, pendanaan, serta infrastruktur pendukung yang mampu mendorong hilirisasi hasil Riset menjadi produk atau kebijakan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan adanya pondasi ekosistem Riset dan Inovasi yang kuat, Kabupaten Semarang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi produk unggulan Daerah dan meningkatkan daya saing regional maupun nasional.

Fokus tahun 2026 pada penguatan landasan ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Semarang diarahkan untuk memperkuat pondasi yang telah dibangun agar lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Daerah. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia peneliti, optimalisasi peran perguruan tinggi dan lembaga Riset, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, penguatan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur Riset yang memadai, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta penetapan regulasi yang mendorong hilirisasi hasil Riset menjadi produk dan kebijakan nyata. Dengan penguatan ekosistem ini, Kabupaten Semarang diharapkan mampu mendorong Inovasi berbasis potensi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2027 diarahkan pada penguatan peran Riset dan Inovasi untuk pembangunan Daerah merupakan langkah penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berbasis pada data, kajian ilmiah, serta solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Riset yang terarah dan Inovasi yang aplikatif, Daerah dapat mengidentifikasi permasalahan strategis, mengoptimalkan potensi lokal, serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Inovasi juga menjadi pendorong utama terciptanya nilai tambah ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing Daerah di tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, Riset dan Inovasi bukan hanya sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Pada tahun 2028 dilakukan peningkatan kualitas peran Riset dan Inovasi untuk pembangunan Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan pembangunan dan mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan mutu penelitian, penguatan kapasitas peneliti, pengembangan infrastruktur pendukung, serta perluasan jejaring kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga Riset, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kualitas Riset yang lebih baik dan Inovasi yang relevan, pembangunan Daerah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi dinamika regional maupun global.

Tahun 2029 diharapkan tercipta pemantapan peran Riset dan Inovasi untuk pembangunan Daerah dilakukan dengan meneguhkan posisi Riset dan Inovasi sebagai dasar dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan Riset, penyelarasan agenda penelitian dengan prioritas pembangunan daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar hasil Riset dapat diimplementasikan secara nyata. Pemantapan ini juga didorong melalui mekanisme hilirisasi hasil penelitian menjadi produk, kebijakan, maupun layanan publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, Riset dan Inovasi tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB VII PROGRAM INDIKATIF

Program indikatif merupakan komponen esensial dalam dokumen rencana induk peta jalan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah. Secara umum, rencana induk peta jalan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah berfungsi sebagai panduan strategis yang mengarahkan arah Riset dan Inovasi di tingkat Daerah. Di dalamnya, terdapat beberapa elemen penting yang saling melengkapi, salah satunya adalah peta jalan Riset dan Inovasi Daerah yang menggambarkan langkah-langkah dan prioritas pengembangan Inovasi secara menyeluruh. Namun, yang menjadi substansi utama dan fokus perhatian dalam rencana induk peta jalan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah adalah program indikatif, karena program ini merinci kegiatan-kegiatan konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut. Dengan demikian, program indikatif tidak hanya menjadi kerangka kerja operasional, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi Riset dan Inovasi di Daerah.

Proses penyusunan program indikatif dimulai dengan mengonversi solusi aplikatif yang berasal dari pengembangan produk unggulan dan penanganan masalah Daerah menjadi serangkaian kegiatan yang terukur. Selain itu, setiap program yang dirancang memiliki jadwal pelaksanaan yang bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas dalam kurun waktu lima tahun masa pembangunan. Dengan demikian, program indikatif tidak hanya mencerminkan langkah strategis, tetapi juga memastikan pelaksanaan yang terstruktur dan terukur sesuai dengan target pembangunan daerah.

Diharapkan program indikatif dapat diadopsi ke dalam perencanaan pada perangkat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pengembangan produk unggulan Daerah sekaligus mengatasi permasalahan utama yang dihadapi. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, distribusi program yang berkaitan dengan pengembangan produk unggulan dan penanganan masalah Daerah disusun secara spesifik dan terperinci dalam matriks indikasi program. Dengan demikian, integrasi program indikatif ke dalam RPJMD akan memberikan arah yang jelas dan terstruktur bagi pembangunan daerah.

Adapun matriks indikasi program dan rencana aksi tahunan sebagai berikut:

Tabel 7.1. Program, Rencana Aksi Tahunan RIPJPID Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	v					Meningkatnya Kegemaran Membaca di Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	v					Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	v					Meningkatnya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kebudayaan	Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	v					Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan UKBM, Peningkatan Sumber Daya Manusia	Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Persentase kader yang mendapatkan Keterampilan Dasar Kader Kesehatan	v	v	v	v	v	Meningkatnya keterampilan dasar kader kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	v	v	v	v	v	Meningkatnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Serasi Kasih (Pemberian Bantuan Permakanan bagi	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	v					Persentase Penurunan PPKS 5 %	Dinas Sosial

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			Lansia dan Disabilitas)								
			Akurasi bantuan sosial dengan peningkatan puskesmas di semua desa (ABSOPSOS)		v					Persentase Penurunan PPKS 2,5 %	Dinas Sosial
			Pembentukan KUBE (Kelompok Usaha Bersama)		v					Persentase Penurunan PPKS 2,5 %	Dinas Sosial
			Pembuatan kartu disabilitas melalui SIPTENAN GAS (Sinergitas Pelatihan, bantuan dan pendampingan berkelanjutan bagi disabilitas)			v				Persentase Penurunan PPKS 2,7 %	Dinas Sosial
			SIAP GRAM (Sinergitas peningkatan graduasi mandiri DTKS)				v			Persentase Penurunan PPKS 3 %	Dinas Sosial
			Optimalisasi peran LKS (OPLAKS)					v		Persentase Penurunan PPKS 3,2 %	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan pengelola pariwisata strategis Kabupaten Semarang -Gedong Songo TravelMart	Persentase peningkatan pengelola prawisata strategis Kabupaten Semarang	v	v	v	v	v	SDM pariwisata yang berperan aktif dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan potensi pariwisata	Dinas Pariwisata

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			-Festival Aerosport / Paralayang Lomba Adhi Karya Pariwisata							Kabupaten Semarang dengan fokus pada pengembangan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Semarang Festival Desa Wisata	Presentase destinasi pariwisata yang dikelola	v	v	v	v	v	Meningkatnya kapabilitas masyarakat (secara individu atau kolektif) untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Semarang	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM ekonomi kreatif tersertifikasi	v	v	v	v	v	Meningkatnya SDM ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan Dokumen Kerjasama dengan Perguruan Tinggi - Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: a. pendidikan dan pengajaran; b. penelitian dan pengembangan; b. pengabdian kepada masyarakat	Persentase kebermanfaatan kerjasama	v	v	v	v	v	Terwujudnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan lembaga pendidikan tinggi dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah yang berdaya saing.	Setda
2	Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Penguatan Kemandirian Pangan.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	v	v	v	v	v	Terwujudnya Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	v	v	v	v	v	Terwujudnya Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM)	Kegiatan Kemitraan (Memitirkan pelaku usaha mikro dengan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Semarang)	Persentasi Pertumbuhan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			Pelatihan E-commerce	Persentasi Pertumbuhan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Sosialisasi Permodalan (OPD menjembatani pelaku usaha dengan perbankan dalam mengakses permodalan)	Persentasi Pertumbuhan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Sertifikasi Halal	Persentasi Pertumbuhan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
			Fasilitasi HKI Merk	Persentasi Pertumbuhan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan gabah kering giling (GKG) untuk pengisian cadangan pangan	PoU (<i>Prevelance of Undernourishment</i>)/ Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	v					Meningkatnya ketercukupan pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Melaksanakan kegiatan stabilitas harga pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM)	PoU (<i>Prevelance of Undernourishment</i>)/ Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	v					Meningkatnya ketercukupan pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Kegiatan pemanfaatan pekarangan	PoU (<i>Prevelance of Undernourishment</i>)/ Prevelensi Ketidacukupan	v					Meningkatnya ketercukupan pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
				Konsumsi Pangan							
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemberian bantuan kendaraan roda 3	%Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Pemberian bantuan Cultivator	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Pemberian bantuan Alat Penyanggul Gulma	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Pemberian bantuan Sprayer Elektrik	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Pemberian bantuan Alat Perajang Tembakau	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Pemberian bantuan Parapara	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
			Uji multi lokasi varietas lokal	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	% Peningkatan produksi komoditi pertanian	v					Meningkatnya prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase DTW dan ekonomi kreatif yang dipromosikan	v	v	v	v	v	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
3	Kemiskinan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan Keterampilan Masyarakat Seperti Keterampilan Mengolah Produk Usaha dan Keterampilan Teknis Lainnya	v					Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan individu dan komunitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Bus Sekolah gratis bagi sekolah di daerah pinggiran daerah perbatasan	Rasio Konektivitas	v	v	v	v	v	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Dinas Perhubungan
			Penyediaan beli layanan angkutan umum gratis sekolah di daerah pinggiran daerah perbatasan	Rasio Konektivitas	v	v	v	v	v	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Dinas Perhubungan
			Penyediaan angkutan rintisan daerah pinggiran daerah perbatasan yang belum terlayani angkutan umum	Rasio Konektivitas	v	v	v	v	v	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Dinas Perhubungan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	v					Meningkatnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Melaksanakan fasilitasi penerapan SPM pada perangkat	Persentase unit kerja/instansi vertikal rumpun pemerintahan dan kesra yang	v	v	v	v	v	- Peningkatan kualitas pelayanan dasar	Setda

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>daerah penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, dan ketenteraman).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun pedoman teknis dan panduan monitoring pelaksanaan SPM. - Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk sinkronisasi capaian indikator SPM dengan target RPJMD. 	difasilitasi/dikoordinasikan						<p>masyarakat yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara bertahap</p> <p>- Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan yang mendukung pengentasan kemiskinan</p>	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan kelompok masyarakat secara berkelanjutan melalui program Akses Reforma Agraria	Persentase kebermanfaatan kerjasama	-	v	v	v	v	Pemberdayaan kelompok masyarakat secara berkelanjutan melalui program Akses Reforma	Setda

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			bekerja sama dengan instansi lintas sektoral							Agraria bekerja sama dengan instansi lintas sektoral	
4	Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	v					Meningkatnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja
5	Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing	Program Pengelolaan Informasi Informatika	Evaluasi dan penyusunan/revi w dokumen SPBE untuk mendapatkan nilai SPBE	Indeks SPBE/Indeks Digital Pemda	v	v	v	v	v	Meningkatnya Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan kapasitas aparatur, fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemdes	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Percepatan penurunan angka stunting dengan pendampingan balita stunting, gerakan cegah stunting	Persentase Prevalensi Angka Stunting	v	v	v	v	v	Menurunnya Prevalensi Angka Stunting	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil/ANC Terpadu	Persentase Pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	v	v	v	v	v	100% Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, menurunnya	Dinas Kesehatan

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
										kematian ibu dan anak	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemetaan kompetensi ASN untuk pertimbangan promosi dan mutasi ASN dengan mengirimkan ASN mengikuti uji kompetensi secara bertahap	Indeks Reformasi Birokrasi	v	v	v	v	v	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan	Indeks Reformasi Birokrasi	v	v	v	v	v	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Indeks Reformasi Birokrasi			v			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	v					Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			Semarang Tahun 2025-2029								
			Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	v					Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Semarang	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan		v				Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan Kajian Branding Kabupaten Semarang	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan		v				Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Pelatihan SDM dalam memberikan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	v	v	v	v	v	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	v	v	v	v	v	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Penyelenggaraan forum diskusi riset dan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	v	v	v	v	v	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
		Program Pengelolaan Pendapatan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Kemandirian Keuangan Daerah	v	v	v	v	v	Meningkatnya kemandirian keuangan pangan	Badan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Publikasi RLPPD	Nilai LPPD	v	v	v	v	v	Peningkatan Transparansi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Setda
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Semarang - Melaksanakan fasilitasi penerapan SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, dan ketenteraman). - Menyusun pedoman teknis dan panduan monitoring	Persentase unit kerja/instansi vertikal rumpun pemerintahan dan kesra yang difasilitasi/dikoor dinasikan	v	v	v	v	v	- Terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah dalam penerapan dan pengendalian SPM. - Tersedianya data dan laporan capaian SPM yang valid,	Setda

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			pelaksanaan SPM. - Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk sinkronisasi capaian indikator SPM dengan target RPJMD.							cepat, dan transparan.	
6	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RISPAL (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		v	v			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Strategi Sanitasi Kabupaten	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		v	v			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan serta pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	v	v	v	v	v	Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Master Plan Saluran Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik		v	v	v	v	Meningkatnya panjang drainase dalam	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
										kondisi baik	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Inventarisasi GRK	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan bibit tanaman	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pembinaan Bank Sampah	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
			Operasional Pengelolaan TPA dan Pengelolaan sampah	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v	v	v	v	v	Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPS3R	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	v					Meningkatnya Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Konflik Sosial	v	v	v	v	v	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Permasalahan Utama Daerah	Program	Rincian Rill Kegiatan	Indikator Utama	Tahun Pelaksanaan					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029		
			Nilai-Nilai Pancasila								
		Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Pembinaan Partai Politik	Jumlah Konflik Sosial	v	v	v	v	v	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial	v	v	v	v	v	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Narkoba	Jumlah Konflik Sosial	v	v	v	v	v	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penganganan Konflik Sosial	Rakor Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Jumlah Konflik Sosial	v	v	v	v	v	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemerintahan Forkopimda dan Instansi terkait	-	v	v	v	v	v	Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan stabilitas dan kondusifitas Wilayah	Setda

Sumber: Tim Penyusun, 2025

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong perkembangan Daerah melalui Riset dan Inovasi. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kegiatan Riset yang aplikatif dan Inovasi yang berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah yang komprehensif dan terstruktur, diharapkan dapat mengoptimalkan produk unggulan Daerah yang ada serta memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Sehingga dapat meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029) dengan tema “Riset dan Inovasi Menuju Kabupaten Semarang Berdaya Saing”, yang dianalisis melalui kerangka ekosistem Riset dan Inovasi daerah, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu:

1. kebijakan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
2. kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
3. Kemitraan Riset dan Inovasi;
4. budaya Riset dan Inovasi;
5. keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
6. penyelarasan dengan perkembangan global.

Melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan dapat menjadi fondasi bagi sinergi antar sektor, mendorong kolaborasi multidisiplin, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arah yang jelas dan terukur, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Melalui Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah, Daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan Inovasi yang berdampak luas, membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang disusun sebagai salah satu dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen teknokratis RPJMD dan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA